

ABSTRAK

Helmy Pradita : PENGAWASAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI

Umrah sudah menjadi minat yang besar bagi masyarakat, Kementerian Agama sebagai pemberi izin bagi para PPIU agar dapat melayani para Jemaah umrah bersamaan dengan pengawasannya. Setiap instansi perlu memahami bahwa sistem yang berjalan selaras dengan aturan institusi tersebut, namun apa yang terlihat di lapangan peran pengawasan masih sangat longgar bagi para PPIU ini menjadi hal yang perlu difokuskan bagaimana adanya tahapan dapat menciptakan dampak positif kepada masyarakat yang memperoleh hasil dari pelayanan publik. Adapun hal yang menjadi urusan serius karena kelonggaran dapat menjadi potensi PPIU bermasalah sedini mungkin. Oleh karena itu dengan adanya tahapan pengawasan diharapkan dapat memaksimalkan peran pengawasan sebuah institusi dan mampu mengendalikan fungsi pengawasannya. Hal demikian merupakan masalah yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pengawasan penyelenggara perjalanan ibadah umrah pada Kankemenag Kota Bekasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori tahapan pengawasan dari Wijayanti yang memiliki empat dimensi yakni memiliki tolak ukur, memiliki perhitungan kapasitas dalam organisasi, meninjau hasil dari tolak ukur yang tersedia dan adanya Tindakan perbaikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat penjelasan secara kualitatif, data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan beberapa dokumen pendukung. Dalam penentuan informan melalui purposive sampling serta menganalisis data dengan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya tahapan pengawasan yang telah diselenggarakan oleh Kankemenag Kota Bekasi kepada para PPIU sudah berjalan dan memberi imbas yang positif walaupun ada beberapa indikator yang tidak cukup dalam menunjang penyelenggaraan, terutama terkait sumber daya pembiayaan dan personilnya serta belum dapat menyesuaikan dengan selaras peraturan menteri yang kemudian perlu dipertimbangkan untuk dapat meninjau setiap tahapan pengawasan terkait hasil yang didapat agar pengawasan dilakukan mendapat hasil maksimal.

yang kemudian peneliti sampaikan yakni saran akademis dengan melakukan kajian terhadap kecenderungan para PPIU yang tidak melaporkan kegiatan mereka saran praktis yakni adanya penganggaran secara khusus yang diberikan terhadap pengawasan ada setiap Kankemenag serta diperlukannya pihak di luar kementerian agama dalam pelaksanaan pengawasan di wilayahnya masing – masing.

.Kata Kunci :Pengawasan, PPIU, Kemenag.

ABSTRACT

Helmy Pradita: SUPERVISION OF UMRAH TRAVEL OPERATORS AT THE OFFICE OF THE MINISTRY OF RELIGION, BEKASI CITY

Umrah has become of great interest to the community, the Ministry of Religion as a permit provider for PPIUs to be able to serve Umrah pilgrims along with their supervision. Every agency needs to understand that the system is running in harmony with the rules of the institution, but what is seen in the field is that the oversight role is still very lax for PPIUs. As for matters that are a serious matter because leniency can create potential problems for PPIU as early as possible. Therefore, the presence of supervision stages is expected to maximize the supervisory role of an institution and be able to control its supervisory function. This is the problem behind this research. This study aims to find out how the supervision of the organizers of the Umrah pilgrimage at the Kankemenag Bekasi City is carried out.

The theory used in this study is Wijayanti's theory of stages of supervision which has four dimensions, namely having benchmarks, having capacity calculations within the organization, reviewing the results of available benchmarks and taking corrective action.

This study used a qualitative research method with the nature of a qualitative explanation. Data were collected from observations, interviews and several supporting documents. In determining informants through purposive sampling and analyzing data with three stages namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the supervision stages that have been held by the Bekasi City Ministry of Religion for the PPIU have been running and have had a positive impact, although there are several indicators that are not sufficient to support implementation, especially related to financing resources and personnel and have not been able to adjust to conformity with ministerial regulations. which then needs to be considered to be able to review each stage of supervision related to the results obtained so that supervision is carried out to get maximum results.

which the researchers then conveyed, namely academic advice by conducting a study of the tendency of PPIUs not to report their activities. practical advice, namely that there is a special budget given for supervision in each Kankemenag and the need for parties outside the ministry of religion in carrying out supervision in their respective regions.

Keywords: Supervision, PPIU, Ministry of Religion.